

ABSTRAK

Hak Milik adalah hak yang diinginkan oleh setiap orang, karena hak milik merupakan hak yang paling tinggi serta hak paling kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena *overlapping* di Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena *overlapping*, serta untuk mengetahui yang bisa dilakukan pihak yang dirugikan atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena *overlapping*.

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Juridis Sosiologis, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Serta dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian diolah dan di analisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat dan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum.

Kesimpulan : berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan karena adanya *overlapping* dalam penerbitan sertifikat, yaitu 2 (dua) bidang SHM No. 518 dan 519 yang ditumpangi 3 (tiga) SHM No. 2361, 2362 dan 2363 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 049/G/2014/PTUN.Smg. akibat hukum dari pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu sertifikat hak milik atas tanah yang disengketakan dalam perkara akan beralih kepada pihak yang memenangkan perkara, sedangkan bagi pihak yang kalah dalam perkara harus melepaskan haknya. Serta bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat melakukan gugatan kepada pihak yang merugikan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan.

Kata Kunci : Pembatalan Sertifikat Hak Milik, *Overlapping*

ABSTRACT

Right of Ownership is the right desired by everyone, because property rights are the highest rights and the strongest rights compared to other land rights. The purpose of this research was to find out the implementation of land ownership certificate cancellation due to overlapping in the Semarang City Land Office, to find out the legal consequences of the cancellation of land ownership certificates due to overlapping, and to find out what the injured party could do to cancel the certificate of rights belongs to the land because of overlapping.

This research method uses the Juridical Sociological Method, research that emphasizes legal science, but besides that it also relates the rules of law that apply in society. And with the specification of descriptive analytical research that is a study that describes a clear picture of an object under study which is then processed and analyzed the results of the research to draw conclusions. While the types and sources of data used are using primary data and secondary data. Primary data is data that is obtained directly by means of interviews by informants in order to obtain clarity of accurate data and secondary data, namely through literature studies by collecting data sourced from legal materials.

Conclusion: based on the research carried out, it can be seen that the cancellation of the certificate of ownership of land was carried out due to overlapping in the issuance of certificates, namely 2 (two) fields of SHM No. 518 and 519 which were boarded by 3 (three) No. SHMs. 2361, 2362 and 2363 which were later canceled by the State Administrative Decision Number: 049 / G / 2014 / PTUN. Smg. the legal consequences of the cancellation of land title certificates, namely the land ownership certificate disputed in the case will be transferred to the party who wins the case, while those who lose the case must give up their rights. As well as those who are disadvantaged over the cancellation of the certificate of ownership rights on land can make a claim to the adverse party through litigation channels or court lines.

Keywords: *Cancellation of Ownership Certificate, Overlapping*